

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta :Sinar Grafika, 2011.

Ahmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Jakarta : Konstitusi Press, 2013.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012.

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia IV, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000.

Bagir Manan, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, Makalah, tidak dipublikasikan, Jakarta, 1995.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Lukman Ambarak, *Peranan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Air Panas*. Makalah. Tanpa Tahun

M. Andre Martin F.V Bhaskara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Karina, Surabaya, 2002.

Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pusataka Utama, Jakarta. 1998

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah Universitas Airlangga, Surabaya, Tanpa Tahun.

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta:Ghalia Indonesia, 1981.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:PT Grafindo Persada, 2006.

Victor Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1988.

Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, Yogyakarta : STPN Press, 2014.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

B. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-undang No.21 Tahun 2014 tentang panas bumi.

Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 03 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor 20 Tahun 2007 tentang pedoman Organisasi dan Tatat Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguang di Daerah.

Permen Pariwisata No. 27 Tahun 2015 Tentang Standar Pengelolaan pemandian air panas.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Panas Bumi.

Peraturan Daerah Solok No. 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013-2025.

Peraturan Bupati Solok 51 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala KP3M Kabupaten Solok.

C. Media dan Website

www.tabloidbijak.com/2015/08/pengelolaan-pemandian-air-panas-bukik.html?m==1 diakses tanggal 15 Januari 2016 pukul 13.20 WIB

www.jurnalasia.com mata air picu merandangnya Masyarakat diakses pda tanggal 2 Februari pukul 16.00 WIB

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/articael> di akses pada tanggal 15 Februari 2016 Pukul 11.00 WIB

<http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/energi-panas-bumi/item268> diakses tanggal 23 Maret 2016 Pukul 11.08 WIB

